

	News Title : Perbaiki Tata Kelola Perdagangan CPO di Indonesia	
	Media Name : Neraca	Journalist : novi
	Publish Date : 16 October 2023	Tonality : Positive
	News Page : 11	News Value : 123,000,000
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 41,000,000
	Section/Rubrication : Industri Perdagangan	Topic : Bursa CPO

BURSA CPO

Perbaiki Tata Kelola Perdagangan CPO di Indonesia

Jakarta - Pemerintah meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Bursa Berjangka Indonesia pada Jumat, (13/10) di Jakarta. Peluncuran Bursa CPO ini merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Selain itu, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan harga acuan CPO.

■ NERACA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan terobosan perbaikan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka yang dilakukan dalam upaya memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Selain itu, peluncuran Bursa CPO merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil/petani kelapa sawit.

Seperti diketahui, Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri. Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari Rotterdam dan Malaysia.

“Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan. Indonesia belum memiliki harga

acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia. Kami banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha jika harga acuan masih bersumber dari negara lain tidak tepat. Hal ini juga berdampak di hilir, misalnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi melalui terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market *influencer* bagi dunia,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menekankan, CPO merupakan komoditas strategis Indonesia. Pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.

Selain itu, perdagangan CPO di bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit atau kebun kelapa sawit untuk melakukan transaksi komoditasnya dengan harga kompetitif.

“Peluncuran Bursa CPO Indonesia juga merupakan komitmen Kemendag

dalam menciptakan ekosistem perdagangan CPO,” jelas Zulkifli.

Zulkifli memperjelas, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (*voluntary*).

“Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan pergerakan pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuh Zulkifli.

Zulkifli berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mendongkrak transaksi CPO.

“Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target Perba ini akan terlaksana dengan baik, dan Bursa CPO Indonesia menjadi acuan harga di Indonesia. Terbentuknya Bursa CPO harus mendorong penguatan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influencer di pasar global,” tutur Zulkifli.

Zulkifli juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko menyampaikan, pada 9 Oktober 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO-10/2023.

“Pembentukan Bursa CPO ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya mendorong perdagangan CPO lokal yang wajar dan adil untuk menjamin kestabilan berusaha dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Kesempatan ini merupakan momen yang baik karena menjadi sarana edukasi pemerintah kepada masyarakat bahwa komoditas unggulan kita yaitu CPO harus lebih didorong agar menjadi tuan di rumah sendiri,” ujar Didid.

Didid mengungkapkan, perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka Indonesia ini bersifat sukarela.

“Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami juga mendorong UMKM (usahamicro kecil dan menengah) pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini.

Hal ini karena perdagangan di bursa akan mengempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama (*same level playing field*) serta memiliki kekuatan tawar yang sama karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan penjual dengan pembeli,” kata Didid. ● novi